

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Karimuddin dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini: 2022.
- Admadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010.
- Ahmad, Mumtaz, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Penerjemah Ena Hadi Bandung: Mizan, 1996, Cetakan ke tiga.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terjemah A. Hafiz Zain, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Denny, Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaran*, Jakarta: Kompas, 2008.

- Djazuli, H.A., *fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Djohan, Djohermansyah, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UI Press, 2007.
- Huda, Nimatul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2016.
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press: Yogyakarta, 2005.
- Ismail, Yahya, *Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahayu, Sri Ani, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori dan Impilkasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cetakan ke satu.

- Rowa, Hironimus, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015.
- Setiawan, Dian Bakti, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Una, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989.
- Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: UNISSILA PRESS, 2016.
- Wignjosoebroto, Soetandyo dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li Dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Irfan Mas'ud dkk, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam (Nidhamul Hukmi Fil Islam)*, Surakarta: Bangil Al-Izzah, 2002.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

JURNAL

F.X. Adji Samekto, Impeachment Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 No. 3 (September 2017).

Kemas Arsyad Somad, “Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 4 No. 4 (4 Oktober 2011).

William Boyke Gosal, Pemberhentian Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Lex Administratum*, Volume 9 N0. 4 (April 2022).

Yoga Partamayasa, “Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah”, *Jurnal Yustika*, Volume 23 No. 01 (Juli 2020).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

SKRIPSI

Fawaid, Ahmad Rizal, "Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Fikri, Farhan Muhammad, "Pemakzulan Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyash", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Herawati, Siti, "Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin)", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Indriyani, Widiya, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

INTERNET

Detik News, *MA Tolak Pemakzulan Walikota Pematang Siantar*, <https://news.detik.com/berita/d-6769221/ma-tolak-pemakzulan-wali-kota-pematang-siantar>, diakses 29 September 2024, pukul 17:45 WIB.

Benteng Siantar, *DPRD Siantar Ungkap Indikasi Pemalsuan Dokumen Negara, Ada Tanda Tangan Walikota Susanti Juga Lho*, <https://siantar.bentengtimes.com/news/siantar/2023/03/21/19440/dprd-siantar-ungkap-indikasi-pemalsuan-dokumen-negara-ada-tanda-tangan-walikota-susanti-juga-lho/>, diakses 28 April 2025 pukul 13:08 WIB